



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



INDIKATOR TUJUAN

Upaya yang telah dilakukan dalam peningkatan kinerja indeks kapasitas fiskal daerah dengan strategi:

1. Melaksanakan kegiatan *door to door service* yang merupakan bentuk penagihan pajak bagi wajib pajak dari satuan rumah tangga yang dilaksanakan penagihan;
2. Melaksanakan *updating* basis data pajak daerah untuk mencapai tingkat keakuratan data pajak sehingga dapat dipergunakan dalam menentukan proyeksi pendapatan;
3. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi dalam bentuk sosialisasi langsung, penyebaran leaflet, booklet, sosial media serta media lainnya ke masyarakat untuk mematuhi ketentuan bayar pajak sesuai dengan tepat waktu untuk menghindari denda keterlambatan sehingga pembangunan Sumatera Selatan terus berjalan;
4. Melaksanakan sinergi dan kolaborasi dengan 17 (tujuh belas) Pemerintahan Kabupaten/Kota pada Opsen PKB dan Opsen BBN-KB sehingga jangkauan layanan pembayaran pajak sampai ke tingkat kelurahan atau pedesaan;
5. Mempercepat proses deregulasi beberapa peraturan yang terkait dengan pajak daerah untuk memastikan kapasitas dan supremasi hukum di bidang perpajakan;
6. Melaksanakan rapat koordinasi bersama dengan Tim Pembina Samsat di tingkat Provinsi untuk memastikan dukungan kinerja dari pihak Kepolisian dan Jasa Raharja;
7. Perpanjangan kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka penambahan kuota akses data kependudukan;
8. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak menuju pelayanan prima melalui inovasi-inovasi pelayanan yang dilakukan masing-masing UPTB;

9. Memperluas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penambahan titik pelayanan baru seperti samsat desa dan samsat drive thru.

Tabel 3.7
Faktor Pendukung dan Keberhasilan Kinerja

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TAHUN 2025			DUKUNGAN ANGGARAN TAHUN 2025			FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN KINERJA
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
1.	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	1,95	1,554	79,692	500.000.000	454.936.040	90,98	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> - Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; - Upaya <i>cross-cutting</i> bersama stakeholder Kepolisian dan Jasaraharja dalam penerimaan pajak PKB dan BBN-KB sudah optimal dengan penggunaan anggaran yang efisien - Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja <u>Faktor Pendukung:</u> - Pembentukan Tim Optimalisasi Pendapatan (OPAD) telah memberikan kontribusi nyata dalam mencapai kinerja pencapaian penerimaan PAD diatas 90%, e kinerja pegawai dengan SKP memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja - Pelaksanaan door to door service cukup efektif sebagai aktivitas nyata dalam rencana aksi AKIP - Kolaboratif baik internal dan eksternal bagi upaya peningkatan kinerja organisasi - Memanfaatkan teknologi untuk mempermudah transaksi pembayaran pajak daerah seperti, pembayaran secara non tunai menggunakan mesin EDC, QRIS serta pengembangan pembayaran pajak melalui modern kanal - Kolaboratif baik internal dan eksternal bagi upaya peningkatan kinerja organisasi - Sosialisasi secara massif terhadap pembayaran pajak daerah cukup signifikan - Program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor yang berlangsung pada tanggal 16 Agustus 2025 s.d 17 Desember 2025

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2025)

3.1.1 Sasaran Strategis 1 (SS.1)

SS.1

Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal

".....*Revenue mobilization* merupakan salah satu strategi yang diinternalisasi oleh Pemerintah Daerah dalam melihat kemandirian daerah dalam pembangunan yang mengandalkan pada kekuatan pendanaan yang bersumber pendapatan asli daerah....."

IKSS.1

Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD (*Revenue Mobilization*)

Upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan kinerja indikator *revenue mobilization* sebagai berikut:

1. Pembangunan dan pengembangan aplikasi samsat bapenda, perbaikan Sistem Informasi Manajemen (SIM) terkait pengolahan, pengamanan dan up grading data serta peralatan pengolahan data yang lebih canggih dan modern;
2. Pengembangan Aplikasi E-Samsat berupa Layanan Samsat Online Nasional dan Layanan Samsat Online Sumsel;
3. Secara berkala melaksanakan rapat koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Sumatera Selatan untuk membahas kendala dan permasalahan yang timbul di lapangan;
4. Melakukan penagihan langsung kepada objek-objek pajak daerah di lapangan, seperti objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Alat Berat dan Pajak Air Permukaan (PAP) yang berada di semua Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;
5. Mengintensifkan pendataan objek Pajak Kendaraan Bermotor terhadap kendaraan bermotor yang berasal dari luar provinsi (Nopol non-BG) yang beroperasi di Provinsi Sumatera Selatan melalui razia kendaraan bermotor bersama-sama dengan instansi terkait;

6. Melakukan penagihan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor secara persuasive;
7. Melakukan pendekatan dan koordinasi dengan showroom penjual kendaraan bermotor bekas dalam upaya meningkatkan penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua (BBN-KB II);
8. Meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat akan pentingnya kewajiban membayar pajak melalui penyuluhan / sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan.

Tabel 3.16
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan IKSS 1 serta Faktor Pendukung

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TAHUN 2025			DUKUNGAN ANGGARAN TAHUN 2025			FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN KINERJA
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
2.	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD (<i>Revenue Mobilization</i>)	5,00	1,1187	22,374	312.400.000	284.937.838	91,21	Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90% 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Upaya <i>cross-cutting</i> bersama stakeholder Kepolisian dan Jasaraharja dalam penerimaan pajak PKB dan BBN-KB sudah optimal dengan penggunaan anggaran yang efisien 3. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja Faktor Pendukung: 1. Pembentukan Tim Optimalisasi Pendapatan (OPAD) telah memberikan kontribusi nyata dalam mencapai kinerja pencapaian penerimaan PAD diatas 90%, e kinerja pegawai dengan SKP memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja 2. Terus melakukan rapat koordinasi dengan OPD pemungut retribusi dan BUMD/BUMS yang menerima penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara rutin 3. Pelaksanaan operasi gabungan dengan pihak Kepolisian, Dishub dan Sat Pol PP berjalan cukup efektif 4. Koordinasi dan konsultasi secara intensif dengan Kementerian ESDM terkait dengan dana bagi hasil Migas 5. Memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dari sisi pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah 6. Sinergi dan kolaborasi pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2025)

3.1.2 Sasaran Strategis 2 (SS.2)

SS.2

Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah

".....Kemandirian fiskal sendiri merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sendiri kegiatan Pemerintah Daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari Pemerintah Pusat. Kemandirian fiskal daerah dapat diketahui dengan menghitung rasio antara pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan atau rasio pendapatan transfer terhadap total

IKSS.2

Indeks Kemandirian Fiskal Daerah

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan indeks kemandirian fiskal daerah, antara lain:

1. Melaksanakan operasi kepatuhan wajib pajak daerah, bersama dengan pihak Kepolisian, Jasa Raharja, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja dengan razia;
2. Memberikan program penghapusan sanksi administrasi berupa denda dan bunga Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui pendidikan formal dan informal secara bertahap;
4. Pendampingan tim korsupgah KPK dalam optimalisasi pendapatan daerah;
5. Perpanjangan kerjasama dengan BP Batam dalam rangka back up database server utama yang ada main/recovery data;
6. Integrasi data wajib pajak pusat dengan data wajib pajak daerah pada Dirjen Pajak Kementerian Keuangan;
7. Terus melakukan rapat koordinasi dengan OPD pemungut retribusi dan BUMD/BUMS yang menerima penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara rutin;

8. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak menuju pelayanan prima melalui inovasi-inovasi pelayanan yang dilakukan masing-masing UPTB;
9. Mengintensifkan pendataan objek Pajak Kendaraan Bermotor terhadap kendaraan bermotor yang berasal dari luar provinsi (Nopol non-BG) yang beroperasi di Provinsi Sumatera Selatan melalui razia kendaraan bermotor bersama-sama dengan instansi terkait;
10. Terus melaksanakan program ekstensifikasi pajak daerah atau memperluas pendaftaran objek pajak daerah melalui peran investasi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu.

Tabel 3.25
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan IKSS 2 serta Faktor Pendukung

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TAHUN 2025			DUKUNGAN ANGGARAN TAHUN 2025			FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN KINERJA
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
3.	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	0,434	0,478	110,14	980.400.000	814.937.400	83,12	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> - Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; - Tagging pendanaan pembangunan melalui PAD pada APBD telah tepat sasaran <u>Faktor Pendukung:</u> - Memberikan program penghapusan sanksi administrasi berupa denda dan bunga Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - Pembentukan Satgas PBB-KB pada perairan/laut di Provinsi Sumatera Selatan - Integrasi data wajib pajak pusat dengan data wajib pajak daerah pada Dirjen Pajak Kementerian Keuangan - Perpanjangan kerjasama dengan BP Batam dalam rangka back up database server utama yang ada main/recovery data - Pembangunan dan pengembangan aplikasi samsat bapenda, perbaikan Sistem Informasi Manajemen (SIM) terkait pengolahan, pengamanan dan up grading data serta peralatan pengolahan data yang lebih canggih dan modern - Pengawasan pajak daerah secara intensif berbasis risiko untuk kendali kecurangan terhadap kebocoran penerimaan pajak daerah - Meningkatkan intensifikasi, memperluas ekstensifikasi serta diversifikasi pajak daerah - Memperluas akses keuangan pembayaran pajak daerah melalui platform digitalisasi untuk inklusi keuangan yang lebih baik

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2025)

3.1.3 Sasaran Strategis 3 (SS.3)

SS.3

Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Daerah dalam APBD

".....Pendapatan ini merupakan realisasi pendapatan daerah provinsi sesuai penyelenggaraan kewenangan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah"

IKSS.3

Pertumbuhan Pendapatan Daerah dalam APBD

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan pendapatan daerah, antara lain:

1. Melakukan pendekatan dan koordinasi dengan showroom penjual kendaraan bermotor bekas dalam upaya meningkatkan penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua (BBN-KB II);
2. Meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat akan pentingnya kewajiban membayar pajak melalui penyuluhan / sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;
3. Kegiatan sosialisasi baik media sosial dan terjun langsung kelapangan serta pemberian reward kepada wajib pajak;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan sarana prasarana, peningkatan kualitas layanan sumber daya manusia, mempercepat proses layanan;
5. Melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan OPD pemungut retribusi;
6. Mengupayakan peningkatan penerimaan dari masing-masing Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, antara lain dalam bentuk peningkatan penyertaan modal kepada masing-masing BUMD di lingkungan Pemerintah Sumatera Selatan;

7. Mengadakan koordinasi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan guna mencari upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah dari bagi hasil laba BUMD dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
8. Melakukan evaluasi terhadap potensi yang dapat dimanfaatkan dalam upaya peningkatan kontribusi BUMD, salah satunya dengan membuat rencana bisnis perusahaan.

Tabel 3.35
Faktor Penghambat dan Pendorong IKSS 3 Tahun 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TAHUN 2025			DUKUNGAN ANGGARAN TAHUN 2025			FAKTOR PENGHAMBAT KINERJA
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
4.	Meningkatnya pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	Pertumbuhan Pendapatan Daerah dalam APBD	1,26	(10,258)	(8,14)	535.000.000	456.199.100	85,27	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja 3. Perhitungan nilai efisien sumber daya (anggaran) dimulai sejak penyusunan rancangan awal Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 4. Perubahan rencana kerja memastikan ketercapaian kinerja dengan dukungan anggaran <u>Faktor Penghambat:</u> 1. Perubahan paradigma kebijakan UU 28/2009 ke UU 1/2022, dimana pada tahun 2025, awal pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB 2. Pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2025 mengamatkan bahwa Opsen PKB dan Opsen BBN-KB split payment secara real time ke RKUD Kabupaten/Kota 3. Secara pencatatan akuntansi realisasi Opsen PKB dan Opsen BBN-KB langsung dicatat ke RKUD Kabupaten/Kota 4. Belum optimalnya upaya meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak di Sumatera Selatan 5. Kondisi perekonomian di Sumatera Selatan dan di seluruh provinsi di Pulau Sumatera mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi 6. Konsolidasi fiskal antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah mengalami penyesuaian sehingga mempengaruhi nilai transfer ke daerah

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2025)

3.1.4 Sasaran Strategis 4 (SS.4)

SS.4

Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

".....Peran pendapatan pajak daerah dalam perekonomian regional itu sendiri ditunjukkan dengan membandingkan realisasi pajak daerah terhadap total pendapatan dari perekonomian daerah provinsi, rasio pajak daerah (local tax ratio) yaitu perbandingan antara realisasi pajak daerah dengan total pendapatan dari aktivitas ekonomi regional provinsi....."

IKSS.4

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kontribusi pajak daerah terhadap PDRB, antara lain:

1. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pemungutan pendapatan daerah secara bertahap terutama untuk UPTB baru;
2. Melaksanakan door to door service, penagihan pajak daerah dari satuan rumah tangga yang berkerjasama dengan 17 (tujuh belas) Pemerintahan Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan;
3. Melaksanakan operasi kepatuhan wajib pajak bersama dengan Kepolisian, Jasa Raharja, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak daerah;
4. Melaksanakan pengawasan pajak daerah secara intensif berbasis risiko;
5. Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan internal sektor pajak daerah;
6. Kerjasama dengan Kementerian Perhubungan Laut, TNI AL, Pol Airud terkait pengawasan peredaran penjualan bahan bakar kendaraan bermotor di perairan;

7. Perpanjangan kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka penambahan kuota akses data kependudukan;
8. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak menuju pelayanan prima melalui inovasi-inovasi pelayanan yang dilakukan masing-masing UPTB;
9. Memperkuat sistem informasi teknologi secara bertahap terus membenahi sistem IT melalui kerjasama dengan pihak ketiga;
10. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui penyuluhan dan sosialisasi tentang pentingnya pembayaran pajak dan retribusi daerah.

Tabel 3.44
Faktor Penghambat Kinerja IKSS 4

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TAHUN 2025			DUKUNGAN ANGGARAN TAHUN 2025			FAKTOR PENGHAMBAT KINERJA
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
5.	Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	1,25	0,909	72,72	756.287.000	668.506.000	88,39	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja 3. Perhitungan nilai efisien sumber daya (anggaran) dimulai sejak penyusunan rancangan awal Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) <u>Faktor Penghambat:</u> 1. Belum optimalnya pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB Bersama Pemerintahan Kabupaten/Kota 2. Kebijakan equivalen pembayaran pajak daerah PKB dan BBN-KB berdampak pada penurunan penerimaan pendapatan di sektor pajak daerah 3. Perlambatan struktur perekonomian daerah yang mengakibatkan daya beli masyarakat menjadi rendah 4. Tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak daerah masih rendah terutama pajak PKB 5. Kendaraan yang beroperasi dalam menjalankan usahanya di Sumatera Selatan banyak yang berasal dari luar Provinsi Sumatera Selatan 6. Belum optimalnya sistem pengendalian intern pemerintah dalam pengawasan pajak daerah 7. Belum optimalnya update data kendaraan bermotor 8. Layanan pembayaran pajak daerah belum seluruhnya menyentuh titik layanan sampai ke tingkat pedesaan

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2025)



3.1.5 Sasaran Strategis 5 (SS.5)

SS.5

Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah

".....Total PAD dalam realisasi adalah nilai realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam APBD tahun pelaporan yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah....."

IKSS.5

Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah, antara lain:

1. Meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat akan pentingnya kewajiban membayar pajak melalui penyuluhan / sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;
2. Meningkatkan sosialisasi dan pelayanan untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam membayar retribusi daerah;
3. Mengupayakan peningkatan penerimaan dari masing- masing Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, antara lain dalam bentuk peningkatan penyertaan modal kepada masing- masing BUMD di lingkungan Pemerintah Sumatera Selatan;
4. Mengupayakan peningkatan pendapatan di sektor Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah dengan mengoptimalkan dan mengintensifkan jenis-jenis pendapatan dari komponen penerimaan Lain-lain PAD yang Sah antara lain penerimaan jasa giro dari Bank Sumsel Babel dan penerimaan-penerimaan lainnya;
5. Meningkatkan kinerja Badan Layanan Unit Daerah (BLUD) dalam menggali pendapatan asli daerah;

6. Melakukan rapat koordinasi bersama Direktorat Jenderal Minyak dan Gas pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta dalam rangka membahas Lifting Minyak dan Gas, Bidang Pertambangan Umum, serta Dana Bagi Hasil Bidang Kehutanan;
7. Melakukan rapat koordinasi dan rekonsiliasi bersama Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada Kementerian Keuangan RI di Jakarta dalam rangka membahas pelaksanaan penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Bagi Hasil Bidang Pertambangan Umum dan Dana Bagi Hasil Bidang Kehutanan.

Tabel 3.54
Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja IKSS 5

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TAHUN 2025			DUKUNGAN ANGGARAN TAHUN 2025			FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN KINERJA
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
6.	Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	48,45	45,835	94,60	1.140.000.000	1.098.450.000	96,35	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Program keringan pajak daerah dan insentif pajak daerah menstimulus PAD 3. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja <u>Faktor Pendukung:</u> 1. Sinergi dan kolaborasi antar stakeholder dalam menggali potensi Retribusi Daerah 2. Kerjasama kolaboratif bersama Agen Pemegang Merk Tunggal (ATPM) kendaraan bermotor 3. Kerjasama dengan Camat, Lurah dan Ketua RT setempat dalam rangka penagihan pajak daerah 4. Kerjasama dengan Dirlantas melalui kegiatan razia kendaraan bermotor 5. Program kredit murah bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah dalam keringanan berusaha 6. Memperluas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penambahan titik pelayanan baru seperti samsat desa dan samsat drive thru 7. Mengendalikan tindak pengendalian atas perhitungan beban tariff pajak, denda pajak dan bunga pajak 8. Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor telah di update dalam system informasi pembayaran pajak daerah 9. Secara berkala melaksanakan rapat koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Sumatera Selatan untuk membahas kendala dan permasalahan yang timbul di lapangan

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2025)



3.1.6 Sasaran Strategis 6 (SS.6)

SS.6

Meningkatnya Pendapatan Daerah

".....Indikator Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, tingkat inflasi daerah serta daya beli masyarakat"

IKSS.6

Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan realisasi PAD, antara lain:

1. Melaksanakan program intensifikasi pajak daerah, dengan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak daerah;
2. Memperluas ekstensifikasi pajak daerah dengan penambahan objek pajak baru melalui kerjasama investasi daerah dengan Perangkat Daerah DMPTSP;
3. Meningkatkan deversifikasi pajak daerah dengan konsolidasi fiskal Pemerintah Pusat;
4. Meningkatkan koordinasi dengan BUMN maupun BUMS agar berperan aktif dan berpartisipasi dalam mendukung program pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan dilakukannya pendekatan yang intensif kepada masing-masing BUMN maupun BUMS tersebut maka diharapkan kepada masing-masing BUMN dan BUMS dapat meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
5. Terus mengadakan pendekatan kepada beberapa BUMN maupun BUMS yang belum memberikan kontribusi pada Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk selanjutnya diharapkan dapat memberikan kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

6. Melakukan pendekatan dan koordinasi dengan showroom penjual kendaraan bermotor bekas dalam upaya meningkatkan penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua (BBN-KB II);
7. Meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat akan pentingnya kewajiban membayar pajak melalui penyuluhan / sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan.

Tabel 3.64
Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja IKSS 6

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TAHUN 2025			DUKUNGAN ANGGARAN TAHUN 2025			FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN KINERJA
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
7.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	92,03	93,198	101,27	634.000.000	550.200.000	86,78	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Upaya <i>cross-cutting</i> bersama stakeholder Kepolisian dan Jasaraharja dalam penerimaan pajak PKB dan BBN-KB sudah optimal dengan penggunaan anggaran yang efisien 3. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja <u>Faktor Pendukung:</u> 1. Pembentukan Tim Optimalisasi Pendapatan (OPAD) telah memberikan kontribusi nyata dalam mencapai kinerja pencapaian penerimaan PAD diatas 90%, e kinerja pegawai dengan SKP memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja 2. Pelaksanaan door to door service cukup efektif sebagai aktivitas nyata dalam rencana aksi AKIP 3. Kolaboratif baik internal dan eksternal bagi upaya peningkatan kinerja organisasi 4. Memanfaatkan teknologi untuk mempermudah transaksi pembayaran pajak daerah seperti, pembayaran secara non tunai menggunakan mesin EDC, QRIS serta pengembangan pembayaran pajak melalui modern kanal 5. Pelaksanaan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD) secara gabungan dengan stakeholder terkait dan secara berkala waktu 6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui penyuluhan dan sosialisasi tentang pentingnya pembayaran pajak dan retribusi daerah

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2025)

3.1.7 Sasaran Strategis 7 (SS.7)

SS.7

Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB

".....Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah"

IKSS.7

Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kontribusi PAD terhadap PDRB Lapangan Usaha Non Migas, antara lain:

1. Melakukan penagihan langsung kepada objek-objek pajak daerah di lapangan, seperti objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Alat Berat dan Pajak Air Permukaan (PAP) yang berada di semua Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;
2. Mengintensifkan pendataan objek Pajak Kendaraan Bermotor terhadap kendaraan bermotor yang berasal dari luar provinsi (Nopol non-BG) yang beroperasi di Provinsi Sumatera Selatan melalui razia kendaraan bermotor bersama-sama dengan instansi terkait;
3. Meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat akan pentingnya kewajiban membayar pajak melalui penyuluhan / sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;
4. Mengupayakan peningkatan penerimaan dari masing- masing Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, antara lain dalam bentuk peningkatan penyertaan modal kepada masing- masing BUMD di lingkungan Pemerintah Sumatera Selatan;
5. Mengupayakan peningkatan pendapatan di sektor Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah dengan mengoptimalkan dan mengintensifkan jenis-jenis pendapatan dari komponen

penerimaan Lain-lain PAD yang Sah antara lain penerimaan jasa giro dari Bank Sumsel Babel dan penerimaan-penerimaan lainnya;

6. Melakukan rapat koordinasi bersama Direktorat Jenderal Minyak dan Gas pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta dalam rangka membahas Lifting Minyak dan Gas, Bidang Pertambangan Umum, serta Dana Bagi Hasil Bidang Kehutanan.

Tabel 3.74
Faktor Penghambat Kinerja IKSS 7

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TAHUN 2025			DUKUNGAN ANGGARAN TAHUN 2025			FAKTOR PENGHAMBAT KINERJA
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
8.	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	0,96	0,682	71,04	300.000.000	257.345.430	85,78	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah Pusat secara intensif (kolaboratif) memberikan pengaruh terhadap penyaluran dana transfer pusat bisa terealisasi 3. Penyaluran dana bagi hasil pemerintah pusat dengan system <i>treasury deposit facility</i> cukup efisien <u>Faktor Penghambat:</u> 1. Perlambatan perekonomian Sumatera Selatan yang menyebabkan PDRB riil per kapita mengalami perlambatan yang mempengaruhi daya beli masyarakat terhadap kendaraan baru 2. Belum optimalnya penagihan pajak daerah sampai ke titik pelayanan wilayah pedesaan 3. Perlambatan daya serap anggaran sinergi Opsen PKB dan Opsen BBN-KB dengan Pemerintahan Kabupaten/Kota 4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di sektor pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah belum berjalan secara optimal 5. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak daerah belum optimal 6. Belum optimalnya penggalan sumber potensi yang menjadi penerimaan Retribusi Daerah 7. Pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB memerlukan kebijakan equivalen dengan pembayaran pajak sesuai UU 28/2009 8. Belum optimalnya sinergi Tim Optimalisasi Pendapatan Daerah (OPAD) perairan dan daratan

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel 2025

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kontribusi PAD terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah, antara lain:

1. Melakukan penagihan langsung kepada objek-objek pajak daerah di lapangan, seperti objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Alat Berat dan Pajak Air Permukaan (PAP) yang berada di semua Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;
2. Mengintensifkan pendataan objek Pajak Kendaraan Bermotor terhadap kendaraan bermotor yang berasal dari luar provinsi (Nopol non-BG) yang beroperasi di Provinsi Sumatera Selatan melalui razia kendaraan bermotor bersama-sama dengan instansi terkait;
3. Meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat akan pentingnya kewajiban membayar pajak melalui penyuluhan / sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;
4. Mengupayakan peningkatan penerimaan dari masing-masing Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, antara lain dalam bentuk peningkatan penyertaan modal kepada masing-masing BUMD di lingkungan Pemerintah Sumatera Selatan;
5. Mengupayakan peningkatan pendapatan di sektor Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah dengan mengoptimalkan dan mengintensifkan jenis-jenis pendapatan dari komponen penerimaan Lain-lain PAD yang Sah antara lain penerimaan jasa giro dari Bank Sumsel Babel dan penerimaan-penerimaan lainnya;
6. Melakukan rapat koordinasi bersama Direktorat Jenderal Minyak dan Gas pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta dalam rangka membahas

Lifting Minyak dan Gas, Bidang Pertambangan Umum, serta
Dana Bagi Hasil Bidang Kehutanan.

Tabel 3.84
Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja IKSS 8

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TAHUN 2025			DUKUNGAN ANGGARAN TAHUN 2025			FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN KINERJA
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
9.	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	1,12	2,097	187,23	500.000.000	414.311.000	82,86	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Program keringan pajak daerah dan insentif pajak daerah menstimulus PAD 3. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja 4. Perhitungan nilai efisien sumber daya (anggaran) dimulai sejak penyusunan rancangan awal Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) <u>Faktor Pendukung:</u> 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui pendidikan formal dan informal secara bertahap 2. Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor telah di update dalam system informasi pembayaran pajak daerah 3. Mengendalikan tindak pengendalian atas perhitungan beban tariff pajak, denda pajak dan bunga pajak 4. Kolaboratif bersama dengan pihak Kepolisian dalam penertiban kendaraan bermotor 5. Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah 6. Mengupayakan peningkatan penerimaan dari masing- masing Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, antara lain dalam bentuk peningkatan penyertaan modal kepada masing-masing BUMD di lingkungan Pemerintah Sumatera Selatan

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel 2025

